

Oleh karena itu, penyusunan TOR kegiatan menjadi sarat mutlak agar kegiatan bisa menghasilkan output yang optimal, sesuai dengan uang yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Kedua, proses pemeriksaan kegiatan asal jadi. Pemeriksaan kegiatan juga tidak terlalu kritis terhadap kegiatan, desain kegiatan, dan outcomes kegiatan.

Sering masing-masing kegiatan yang diaudit adalah berapa peserta, mana bukti fisik tanda tangan yang hadir, dan blangko pengeluaran sewa hotel, honorarium, dan bundle pertanggung jawaban fisik yang dicetak bagus dan rapi. Sementara hasil dan bagaimana tindak lanjut kegiatan, jarang yang serius melanjutkannya menjadi sebuah rencana besar, atau setidaknya menjadi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, sangat diperlukan proses audit kegiatan yang benar sehingga akan menghasilkan efisiensi anggaran, dan program FGD yang memang memang bisa dialihkan kepos kegiatan yang lain, yang lebih benar dilaksanakan. Ketiga adalah kembali kepada persoalan sumber daya manusia aparatur pemerintah. Bahwa untuk membuat kegiatan jalan, mungkin sudah banyak di antara pegawai pemerintah yang bisa melakukan, termasuk mempertanggungjawabkan kegiatan dengan standar-standar yang ditetapkan.

Namun, jelas bahwa untuk melaksanakan kegiatan secara benar dan bermutu diperlukan sumber daya manusia yang mau berkorban, gigih, dan memiliki integritas bahwa aktivitas pertemuan adalah bagus, namun memerlukan keseriusan dalam menyiapkannya.

Diklat perencanaan kegiatan sangat perlu, tidak asal jadi, tetapi benar-benar melahirkan banyak para pegawai pemerintah yang benar dalam menyusun kegiatan. Termasuk menyusun TOR yang membuat kegiatan dapat optimal, efisiensi anggaran terwujud.

ELFINDRI

Profesor Ekonomi SDM Unand dan Sekretaris Majelis Riset, DPT Kemenristek-Dikti

### **13. Koran Padang Eskpres**

**Senin, 15 Januari 2018**

**SENSUS DESA GOYONG ROYONG**



